

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK
DESA KOTA INTAN KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh :

Hariana

e-mail : harianahsb@gmail.com

Pembimbing : Dr. Harapan Tua, RFS M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Hariana (1201134931), Village Chief Leadership on Physical Development of Kota Intan Village Kunto Darussalam Subdistrict Rokan Hulu Regency

Pembimbing Dr. Harapan Tua, RFS, M.Si

The village chief, as leader of government within village scope should be able to perform their duties empirically, either as a public servant or as an intermediary who can provide solutions to the problems that arise in a society that covers the scope of the area under his authority. The aspirations submitted by society should be heard by a village chief so that their common goal can be achieved as expected. Also the physical development of the village must be considered by the village chief, because it will be needed by the villagers. But in fact, there are still some problems caused by the lack of village chief leadership on the physical development of Kota Intan village.

The purpose of this study was to determine the village chief leadership on the physical development of Kota Intan Village Kunto Darussalam Subdistrict Rokan Hulu Regency, as well as factors that hinder the physical development of Kota Intan Village Kunto Darussalam Subdistrict Rokan Hulu Regency. To analyze the phenomenon in this study the author used Sondra P Siagian's theory with indicators as follows : a leader as determinants directions, a leader as a representative and spokesperson, a leader as an effective communicator, a leader as a reliable mediator, and a leader as an effective integrator. Methodology used in this study is a qualitative descriptive study with Snowball sampling method.

This study shows that Chief Village Leadership on Physical Development of Kota Intan Village Kunto Darussalam Subdistrict Rokan Hulu Regency is good. The factors found are funds, land disputes, lack of government attention and resources.

Keywords: Village Chief, Leadership and Development.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bermasyarakat, hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Pada masyarakat modern organisasi yang besar, kompleks, dan canggih banyak bermunculan, dimana salah satu organisasi yang penting adalah organisasi pemerintahan pada suatu Negara. Didalam negara terdapat susunan organisasi pemerintah yang mana sesuai trias politika ada legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam susunan organisasi pemerintahan eksekutif, kepemimpinan tertinggi menurut susunan pemerintahan adalah Presiden dan sampai pada level dibawah pada stuktur pemerintahan adalah Kepala Desa. Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh masyarakat, Kepala Desa adalah seorang wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga, dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa, sehingga peran kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa.

Kepala desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan masyarakat desa bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan di desanya. Kepala desa dalam pembangunan desa mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:

- 1) Kepala desa sebagai Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

- 2) Kepala desa bertanggungjawab atas berbagai data pembangunan untuk menyusun rencana pembangunan desa.
- 3) Kepala desa melakukan titik pangkal administrasi bantuan desa, antara lain menyusun laporan, disamping menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaannya.
- 4) Kepala desa bertanggungjawab dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan sebagainya.

Manusia tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi tetapi lebih dianggap sebagai asset organisasi yang penting. Keefektifan dan keunggulan organisasi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara teoritis, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan pembangunan desa. Hal ini akan dapat tercipta dalam suatu lingkungan kerja yang kondusif, yang antara lain dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Disinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan.

Kemampuan seseorang dalam memimpin sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, seperti kepemimpinan Kepala Desa yang sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan

didesa. Desa patut di lindungi dan di jaga keasliannya karena Desa adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dalam berlangsungnya perkembangan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan Kepala Desa dan perangkat desa yang ada pada desa. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)”.

Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan pelaksanaan otonomi daerah pada tanggal 1 januari 2001, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk mendukung pelaksanaannya, beberapa peraturan pemerintah sudah dikeluarkan. Sejak saat itu, pemerintah dan pembangunan daerah diseluruh Indonesia memasuki era baru yaitu Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Sistem pemerintahan dan pembangunan yang lama sangat sentralistis dan dinominasi oleh Pemerintah Pusat. Saat ini Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang lebih besar dan

sumber keuangan yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya sehingga mendorong terwujudnya pembangunan nasional. Setiap desa memiliki dana yang didapat mulai dari pemerintah pusat sampai pendapatan desa itu sendiri, untuk pembangunan desa yang bersangkutan. Desa Kota Intan memiliki dana sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Dana yang diperoleh Desa Kota Intan empat tahun terakhir (2012-2015)

Dana tersebut yang peroleh desa dari berbagai sumber, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pada pendapatan desa itu sendiri. Dalam hal ini, peran kepala desa sebagai pengawas, pengendali serta sebagai koordinasi terhadap dana-dana yang diperoleh desa akan berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Melalui kebijakan otonomi daerah tentunya daerah dapat leluasa untuk membangun, memberdayakan, dan mengurus sendiri daerah sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memajukan daerah masing-masing. Atas dasar kebijakan itulah yang membuat daerah melakukan pemekaran agar dapat mengurus daerahnya sendiri dan mendapatkan anggaran daerah tersendiri sehingga memudahkan daerah dalam membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam dimekarkan. Kecamatan ini dimekarkan menjadi tiga

Kecamatan, yaitu Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam, dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.

Desa Kota Intan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah Desa Kota Intan menjalankan tugas administratif, pembangunan, pemberdayaan dan hal lainnya yang membentuk tugas desa secara kompleksitas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dengan muncul dan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka dengan jelas dan secara hukum desa memiliki kewenangan secara penuh dalam proses pengelolaan pemerintahan dalam proses pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, pemerintahan Indonesia di canangkan berbagai program diantaranya seperti program inpres desa tertinggal, program pembangunan infrastruktur pedesaan, program alokasi dana desa, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan ini Desa Kota Intan masih belum bisa mengoptimalkan pembangunan dan masih belum bisa memahami mana yang menjadi kebutuhan mendesak dalam pembangunan desa Kota Intan. Dalam hal pembangunan tentunya memperhatikan beberapa aspek agar

tujuan dan fungsi dari pembangunan tersebut bisa terwujud dan di manfaatkan dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Sebagai gambaran khusus mengenai pembangunan fisik desa Kota Intan empat tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel. 1.2 Pembangunan Desa Kota Intan empat tahun terakhir (2012-2015).

Dalam menjalankan fungsi pembangunan Pemerintah Desa Kota Intan telah banyak melakukan pembangunan dan beberapa diantaranya berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya, namun ada juga beberapa diantara pembangunan tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Serta berbagai kendala lain yang membentuk suatu kompleksitas dalam permasalahan pembangunan yang ada di Desa Kota Intan.

Keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pembangunan di desa ini tidak luput dari peran kepemimpinan dari pemimpin desa tersebut, karena pemimpin desa memiliki peran yang sangat kuat dalam pembangunan desa. Desa Kota Intan di pimpin oleh Kepala Desa, yang mana menurut pengakuan beberapa warga yang memiliki penilaian yang sama tentang kepemimpinan kepala desa Kota Intan ini mengatakan bahwa Kepala Desa ini masih kurang efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa. Hal ini dapat dilihat dari jaranganya Kepala Desa tersebut berada dikantor desa dan hanya datang satu kali seminggu kekantor desa yaitu hari selasa, dan juga kepala desa ini kurang berperan

dalam pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan desa yang masih kurang efektif. Salah satu dari warga yang dimintai keterangan oleh penulis tentang kepemimpinan kepala desa Kota Intan ini mengatakan sebagai berikut:

“Kepala Desa hanya datang hari Selasa ke kantor desa, bahkan staf desa jadi ikut-ikutan hanya datang dan bekerja pada hari Selasa saja, hal ini menyulitkan warga yang ingin menemui beliau, dan juga membuat lama dalam pengurusan surat-surat karena untuk mengurus surat-surat penting memerlukan persetujuan dari kepala desa, sedangkan kepala desa jarang ada di kantor desa. Begitu juga dalam hal pembangunan desa, pembangunan desa ini masih kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari masih adanya pembangunan yang terbengkalai, pembangunan yang sudah jadi tapi masih belum bahkan tidak dapat dimanfaatkan oleh kami sebagai masyarakat disini (wawancara dengan salah satu warga Desa Kota Intan, tanggal 10 Desember 2015).”

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa keberadaan Kepala Desa sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam hal pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun nonfisik. Serta keberadaan Kepala Desa di kantor desa juga di inginkan oleh masyarakat agar mudah menemui Kepala Desa. Selain itu, Kepala Desa juga harus memperhatikan pembangunan desa seperti pembangunan fisik yang menjadi kebutuhan warga desa, Kepala Desa harus mampu berperan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin desa.

Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti

masalah Peran Kepemimpinan Kepala Desa yang berkaitan dengan pembangunan desa. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengupayakan suatu peneliandengan judul penelitian sebagai berikut: **“Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”**

Konsep Teori

Konsep yaitu abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Sedangkan yang dimaksud abstraksi adalah proses menarik intisari dari ide-ide, hal-hal, benda-benda, maupun gejala sosial yang khusus. (Pasolong, 2012:77)

Teori adalah pernyataan atau konsep yang telah diuji kebenarannya melalui riset. Dari definisi tersebut, teori mengandung tiga hal, yaitu: pertama, sebuah teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas konstruk-konstruk yang terdefiniskan dengan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun hubungan seperangkat variabel (konstruk) dan dengan demikian merupakan suatu penjelasan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Ketiga, teori menjelaskan fenomena dengan secara rinci variabel tertentu yang terkait dengan variabel tertentu lainnya. (Pasolong, 2012:82)

1. Kepemimpinan

Pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah suatu proses

mempengaruhi orang lain agar berperilaku sesuai dengan yang diinginkan pemimpin tanpa ada rasa terpaksa dari si pengikut untuk mencapai tujuan tertentu, dimana tujuan itu tidak terbatas pada pencapaian tujuan suatu organisasi tetapi termasuk didalamnya tujuan individu yang bersangkutan. (Badeni, 2014:128)

Pimpinan artinya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efisien (Sinambela, 2006:101). Sedangkan kepemimpinan adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakkan orang-orang yang berada dibawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi (Sinambela, 2006:105).

Kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Sementara itu, Kreitner dan Kinicki mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses dimana seorang individu memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama (Robbin dan Judge dalam Wibowo, 2013:264).

a. Pemimpin Formal dan Informal

Menurut Kartini Kartono (2008:9-11) Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi/lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan

dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi.

Ciri-ciri pemimpin formal antara lain adalah:

- 1) Berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tertentu, atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang (ada legitimitas)
- 2) Sebelum pengangkatannya, dan harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu.
- 3) Ia diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya. Karena itu dia selalu memiliki atasan/superiors.
- 4) Dia mendapatkan balas jasa material dan immeteriil tertentu, serta emolumen (keuntungan ekstra, penghasilan sampingan) lainnya.
- 5) Dia bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal, dan dapat dimutasikan.
- 6) Apabila dia malukan kesalahan-kesalahan, dia akan dikenakan sanksi dan hukuman.
- 7) Selama menjabat kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan wewenang, antara lain untuk: menentukan , memberikan motivasi kerja kepada bawahan, menggariskan pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan dan penempatan bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan supervisi dan kontrol, menetapkan sasaran organisasi, dan mengambil

keputusan-keputusan penting lainnya.

Pemimpin informal ialah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kulaitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Ciri-ciri pemimpin informal antara lain ialah:

- 1) Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimitas sebagai pemimpin.
- 2) Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya.
- 3) Dan tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.
- 4) Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela.
- 5) Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu.
- 6) Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh massanya.

b. Asas dan Fungsi Kepemimpinan

Pendapat Kartini Kartono (2008:94) bahwa asas-asas kepemimpinan adalah:

- a) Kemanusiaan, mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan yaitu pembimbing manusia oelh manusia untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu demi tujuan-tujuan manusia.
- b) Efisien, efisiensi teknis maupun sosial, berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber, amteri dan jumlah manusia atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomi, serta asas-asas, manajemen moder.
- c) Kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi.

Fungsi kepemimpinan merupakan fungsi manajemen. Karena itu, pemimpin suatu organisasi menjalankan fungsi manajemen dan sebagai salah satu profesi.

Adapun fungsi kepemimpinan menurut Salam (2004:99-100) yaitu:

- a) Memandu, menuntun dan membimbing pegawai melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
- b) Membangunkan motivasi kerja para pegawai sehingga para pegawai itu mencurahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk menacapai tujuan yang telah ditentukan.
- c) Mengemudikan organisasi.
- d) Membangun jaringan komunikasi.
- e) Memberikan supervisi/*control* yang efisien.
- f) Membawa pengikutnya mencapai sasaran sesuai jadwal

waktu dan rencana yang telah ditentukan.

2. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kepemimpinan kepala desa sangatlah dibutuhkan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan pembangunan desa. Menurut Trisantono (2011:7) Kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan desa, yaitu :

- a) Unsur pemerintahan, antara lain: pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik daerah, dan kerja sama antar desa.
- b) Unsur pembangunan, antara lain: pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan lain sebagainya.
- c) Urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Selain itu, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Kepala desa harus dapat memiliki fungsi sebagai pemimpin pada

berbagai situasi dan perubahan. Karena kepal-kepala berkepemimpinan atau pemimpin yang adalah kepala adalah pelopor, perintis, dan pemukia yang berada didepan, menerobos, menaklukan (mengantisipasi dan memberi solusi), mengintegrasikan dan memberi warna. Fungsi-fungsi itu ibarat jarum dalam benang, dalam hubungan ini, benang adalah manajemen. Proses dan hasil-hasil setiap kegiatan ditentukan, tidak oleh salah satu melainkan oleh kedua-duanya. Jarum harus tajam dan benang harus kuat. Sehingga, antara keduanya ada keserasian, keselarasan dan keseimbangan (Ndraha, 2003:225).

Kemudian Kartono (2001:33) menekankan, bahwa seorang pemimpin harus mampu melaksanakan fungsinya yang antara lain sebagai: memandu, menuntun, membangun, membimbing, memberitahu, membangun motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi/pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang dituju sesuai dengan ketentuan waktu yang direncanakan.

Kepala desa yang merupakan sutau konsep terapan kepemimpinan yang diterapkan dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa harus bisa menjalankan dua peran, yaitu peran sebagai kepala desa yang merupakan kepemimpinan formal didesa, juga sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan didesa yang dipimpinnya. Dimana kepala desa ini harus bisa mengintegrasikan sebagai seorang pemimpin formal pemerintahan desa yang juga perpanjangan tangan dari pemerintah, juga sebagai pemimpin

sosial kemasyarakatan yang bisa menyambut dan menjadi saluran aspirasi masyarakat yang dipimpinnya.

3. Pembangunan

Pembangunan adalah merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Sudriamunawar, 2002:17)

Pembangunan adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2003:147).

Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial (Menurut Seer dalam Nasution, 2004)

Tujuan pembangunan di negara manapun tentunya untuk kebaikan masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Siagian dalam Nawawi (2009), pada umumnya komponen yang dicita-citakan dalam keberhasilan pembangunan adalah relatif dan sukar membayangkan tercapainya "*titik jenuh yang absolut*", dan yang sudah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi, seperti: keadilan sosial, kemakmuran yang merata, perlakuan yang sama dimata hukum, kesejahteraan material, mental, dan

spiritual, kebahagiaan untuk semua, ketentraman, serta keamanan. Untuk mencapai itu, maka masyarakat harus lebih berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang meliputi keterlibatan aktif dalam memikul beban dan tanggungjawab, serta keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat (Tjokroamidjojo dalam Nawawi, 2009)

Jenis penelitian

Terkait dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu", maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2002:3). Penelitian kualitatif bisa sampai pada taraf penulisan yakni penelitian deskriptif dengan peneliti hanya memaparkan suatu keadaan, dimana obyek atau suatu peristiwa tanpa menarik suatu kesimpulan umum.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam, fokus penelitian ini Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan fisik desa adalah bagaimana Kepala Desa memimpin dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa Kota Intan. Adapun alasan melakukan penelitian di Desa Kota Intan ini dikarenakan pembangunan fisik didesa ini masih perlu perhatian dari pemerintahan desa maupun pusat.

Informan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *snowball*

sampling. Metode *snowball sampling* merupakan metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Pemerintahan Desa dan Masyarakat.

Jenis Data Penelitian

a. Data primer

Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data primer ini diperoleh dari informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data primer ini adalah data dari hasil wawancara dan observasi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, atau data yang diolah, seperti data yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk surat kabar dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti (Pasolong, 2012:131). Dua diantara terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan dan merincikan gejala yang terjadi, kemudian mengamati secara langsung objek yang diteliti

sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan antar periset dengan seseorang, yang berharap mendapatkan informasi dan informasi seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek (Berger, 2000:111). Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperincikan dengan cara melihat, mencatat dan mengabadikan dalam gambar.

Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana dengan teknik pengumpulan data teknik triangulasi. Triangulasi teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Proses dalam analisis deskriptif kualitatif yaitu data penelitiannya diambil dari hasil wawancara, desain penelitiannya bersifat terbuka, proses yang lebih penting dari hasil yang diperoleh, kemudian analisis data Chek, Re-Chek, Cross Chek yang dilakukan setelah data terkumpul.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik

**Desa Kota Intan Kecamatan
Kunto Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu**

Didalam bab ini akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul sejumlah data yang diperlukan tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu.

Kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa adalah bagaimana seorang kepala desa bisa memimpin dalam pelaksanaan pembangunan didesa yang dipimpin, dengan melaksanakan pembangunan lebih baik lagi dari sebelumnya, dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa harus memperhatikan kebutuhan dari pembangunan tersebut, baik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa kota intan kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu, sebagai berikut:

Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan desa dituntut bersifat profesional, hal ini dikarenakan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di desa tersebut. Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang tertinggi maupun tingkat pemerintahan terendah agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagai publik servis.

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengambil suatu keputusan dan dapat dilaksanakan serta memperlancar pencapaian tujuan organisasi. dalam penelitian ini, untuk mengukur kepemimpinan Kepala Desa digunakan teori Sondang P siagian (2010:31), adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Selaku Penentu Arah yang akan di Tempuh dalam Usaha Pencapaian Tujuan.
2. Juru Bicara Organisasi dalam Hubungan dengan Pihak-Pihak diluar Organisasi
3. Sebagai Komunikator yang Efektif
4. Sebagai mediator
5. Selaku integrator yang Efektif, Rasional, Objektif dan Netral

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwasannya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu maka dapat diambil kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu secara umum sudah baik, walaupun masih ada diantara fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut masih ada yang kurang baik seperti fungsi komunikator dan fungsi sebagai mediator. Kepala desa sebagai komunikator dalam pelaksanaan pembangunan

fisik di Desa Kota Intan dinilai masih kurang baik, hal ini dikarenakan kurang pandainya kepala desa dalam berkomunikasi dengan masyarakat desa mengenai pembangunan di desa tersebut. Sedangkan, fungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik pembangunan seperti penanganan keluhan masyarakat dalam pembangunan fisik didesa masih kurang baik.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pembangunan fisik di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:
 - a. Sumber Daya Manusia
Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan didesa tersebut, sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut gotong royong bersama dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat desa lebih memilih menerima apa adanya pembangunan yang ada di desa tersebut.
 - b. Dana
Sumber keuangan desa Kota Intan untuk pembangunan fisik berasal dari pemerintah dan swadaya masyarakat, dana untuk pembangunan fisik sudah ada anggarannya masing-

masing hanya saja dana tersebut masih kurang untuk memenuhi pembangunan fisik didesa tersebut dan kepala desa dinilai kurang pandai dalam mencari dana lain seperti pengajuan proposal perusahaan yang ada didesa tersebut.

B. Saran

Melengkapi penulisan ini, sebagai bahan masukan baik yang bersumber dari hasil penelitian maupun sebagai bentuk kepedulian dan informasi bagi Pemerintah Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu serta pembaca yang memiliki minat dan perhatian yang sama maka dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepala desa dapat melaksanakan fungsi kepemimpinan dengan baik terutama kepemimpinan dalam pembangunan, seperti komunikasi kepala desa terhadap masyarakat mengenai pembangunan diharapkan agar diperbaiki lagi agar masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan didesa, agar masyarakat merasa diperhatikan dan diikutsertakan dalam pembangunan, kemudian sebagai pemimpin tertinggi di desa, kepala desa diharapkan bisa menjadi mediator yang handal dalam menangani konflik, seperti keluhan masyarakat terhadap pembangunan yang ada didesa dan juga konflik antara masyarakat desa dengan

perusahaan yang ada didesa tersebut.

2. Sebagai masyarakat desa yang baik, masyarakat diharapkan harus bisa ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan fisik didesa seperti ikut gotong royong bersama dalam pembangunan fisik didesa tersebut agar pembangunan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dalam pemakaian dana untuk pembangunan diharapkan kepala desa harus lebih baik lagi dan bisa lebih kreatif untuk mendapatkan dana dari pihak luar desa seperti dari pihak perusahaan yang ada didesa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adair, John. 2008. *Kepemimpinan Yang Memotivasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Badeni. 2014. *Kepemimpinan & perilaku organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Bratakusuma. 2005. *Perencanaan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kartono, Kartini. 1992. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*. Jakarta: Rajawali Press.
- Krisyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana prenada media group.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy, J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustakim, Mochammad Zaini. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai, Veitzal dan Deddy Mulyadi. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Siagian, Sondang, P. 1998. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____. 2003. *Administrasi Pembangunan*:

- Konsep, Dimensi, dan Strateginya.* Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2004. *Administrasi Pembangunan.* Bandung: Alfabeta.
- _____. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial.* Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2010. *Teori dan Praktek Kepemimpinan.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teoru, Kebijakan, Dan Implementasi.* Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Daerah.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Edisi Bru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudriamunawar, Haryono. 2002. *Pengantar Administrasi Pembangunan.* Bandung: Bandar Maju.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Admnistrasi.* Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi.* Cetakan Ketujuh. Gadjah Mada University Prees. Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafei, Inu Kencana. 2009. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANDRI).* Cetakan Keempat. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibowo. 2013. *Perilaku Dalam Organisasi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Karya Ilmiah

Aldi. 2014. *Analisis Fungsi Kepemimpinan Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir*

Dokumentasi :

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014